

**“MODEL PENCEGAHAN KERUGIAN NEGARA MELALUI *PROBITY*  
AUDIT PADA TAHAP PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
OLEH APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH DAERAH  
(BERDASARKAN PERKA BPKP NOMOR 3 TAHUN 2019)”**

Kurniawan Arifendi <sup>1</sup>  
[kurniawan.arifendi@gmail.com](mailto:kurniawan.arifendi@gmail.com)

ABSTRAKSI

Pekerjaan konstruksi merupakan jenis pengadaan barang jasa pemerintah yang memiliki porsi yang cukup besar dalam anggaran belanja pemerintah daerah. Hasil pengawasan dalam bentuk *post audit* yang dilakukan oleh aparat pengawas pada pengadaan jasa konstruksi sering kali menemukan kondisi adanya kekurangan volume yang mengakibatkan kelebihan pembayaran. Rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap kelebihan pembayaran pada umumnya berupa pengembalian ke kas Negara dan pengenaan sanksi kepada pejabat pengadaan terkait. Pada kenyataannya tindakan administratif tersebut tidaklah serta merta mampu mencegah berulangnya kondisi tersebut.

Pengadaan jasa konstruksi merupakan bagian pengadaan barang/jasa pemerintah yang memiliki multi dimensi tinjauan hukum di dalamnya. Meskipun tahap pelaksanaan pekerjaan konstruksi adalah domain hukum perdata, namun demikian adanya tindakan kerugian Negara dapat merembet pada masalah hukum pidana apabila ditemukan unsur *fraud* di dalamnya.

Lahirnya Perpres 16 tahun 2018 tentang Pedoman pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara eksplisit telah memberikan amanat kepada Kepala Daerah untuk melaksanakan pengawasan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui APIP Daerah. Sesuai dengan peran dan fungsinya maka BPKP telah menerbitkan Perka BPKP Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengawasan Intern Atas pengadaan Barang/Jasa pemerintah. *Probity Audit* merupakan salah satu upaya mewujudkan peran APIP Daerah dalam melakukan pengawasan pengadaan barang/jasa pemerintah selama proses pengadaan barang/jasa berlangsung (*real time audit*).

*Probity audit* pada tahap pelaksanaan pekerjaan konstruksi memiliki fungsi pencegahan terjadinya *fraud* yang menyebabkan kerugian Negara. Tinjauan teori bekerjanya hukum dapat mengidentifikasi model implementasi yang perlu dikembangkan dalam mencapai tujuan *probity audit* untuk mencegah kerugian Negara.

Kata kunci : Kerugian Negara, APIP Daerah, *Probity Audit*

---

<sup>1</sup> Program Master of Law University of Muria Kudus, Kudus

*PREVENTION OF STATE LOSSES MODEL THROUGH PROBITY AUDIT  
ON CONSTRUCTION WORK IMPLEMENTATION STEP BY REGIONAL  
APIP*

*(BASED ON HEAD BPKP REGULATION NUMBER 3 OF 2019)*

Kurniawan Arifendi <sup>2</sup>

[kurniawan.arifendi@gmail.com](mailto:kurniawan.arifendi@gmail.com)

*ABSTRACT*

*Construction work is a type of government procurement of goods and services which has a fairly large portion in the regional government budget. The results of supervision in the form of post audits carried out by supervisory officers on the procurement of construction services often find conditions of a volume shortage that result in overpayments. Recommendations on the results of the examination of overpayments are generally in the form of returns to the country treasury and the imposition of sanctions on the relevant procurement officials. In fact, these administrative actions are not necessarily able to prevent the recurrence of these conditions.*

*The procurement of construction services is part of the government's procurement of goods or services which has a multi-dimensional legal review in it. Although the implementation stage of construction work is the domain of civil law, however, any act of loss to the state can spread to criminal law issues if an element of fraud is found in it.*

*The issuance of Presidential Decree 16 of 2018 concerning the guidelines for the procurement of government goods or services has explicitly given a mandate to Regional Heads to carry out supervision of government procurement of goods or services through the Regional APIP. In accordance with its roles and functions, BPKP has issued BPKP Perka Number 3 of 2019 concerning the guidelines for internal supervision of government procurement of goods or services. Probity Audit is one of the efforts to realize the role of Regional APIP in supervising the procurement of government goods or services during the process of procurement of goods or services (real time audit).*

*Probity audits at the stage of carrying out construction work have the function of preventing fraud that causes state losses. A review of the theory of the working of the law can identify an implementation model that needs to be developed in achieving the objectives of the probity audit to prevent state losses.*

**Keywords:** *State Loss, Regional APIP, Probity Audit*

---

<sup>2</sup> Program Master of Law University of Muria Kudus, Kudus